

## ANALISIS SUMBER PEMBIAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI SDS IT AL-QALAM

(Melalui hasil wawancara, dan observasi yang mengkaji berbagai sumber  
dana dan strategi pengelolaannya)

Muhammad Bahrul Ulum<sup>1</sup>, Yoga Gunawan<sup>2</sup>, Farhan Muhammad Zen<sup>3</sup>, Moh. Sugandi,  
S.Sos., M.Pd<sup>4</sup>

STAI AL BADAR Cipulus Purwakarta<sup>1,2,3,4</sup>

Email [muhammadbahrululum01@gmail.com](mailto:muhammadbahrululum01@gmail.com)<sup>1</sup>, [yogagunawan850@gmail.com](mailto:yogagunawan850@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[farhanmuhammadzen06@gmail.com](mailto:farhanmuhammadzen06@gmail.com)<sup>3</sup>, [sugandi@albadar.ac.id](mailto:sugandi@albadar.ac.id)<sup>4</sup>

---

### Abstract

This research aims to explore and analyze various funding sources used by SDS IT Al-Qalam to support educational activities. The methods employed include direct field observation and in-depth interviews with the school's management and related parties. The research findings indicate that the main funding sources come from student parent contributions, community support, as well as financial aid from the government and educational foundations. Additionally, the findings reveal financial management strategies implemented to ensure the sustainability and efficiency of fund usage. This study provides a concrete overview of how funds are collected and managed transparently to support the achievement of educational quality at SDS IT Al-Qalam. This research is expected to serve as a reference for other educational institutions in optimizing their funding sources.

**Keywords:** Sources of Funding, Funding Management, constraints and challenges in managing educational funding sources

(\*) Corresponding Author: Muhammad Bahrul Ulum, [ulummuhammadbahrul962@gmail.com](mailto:ulummuhammadbahrul962@gmail.com), 087880880997.

---

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan kualitas layanan di setiap lembaga pendidikan. Institusi seperti SDS IT Al-Qalam tidak boleh bergantung pada satu sumber dana saja, melainkan harus mengoptimalkan berbagai sumber secara bijak. Studi ini menganalisis sumber pembiayaan dan strategi pengelolaannya melalui wawancara mendalam dengan pengelola serta dokumentasi terkait, dengan fokus pada kontribusi orang tua siswa, dukungan masyarakat, pemerintah, dan Yayasan semua demi operasional yang transparan dan efisien (Rahma & Al Munir, 2025).

Penelitian sebelumnya menekankan diversifikasi sumber dana untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang. Renny Mayasari dkk. (2018) menyoroti pengelolaan efektif di lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan profesionalisme manajerial dengan nilai syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Diversifikasi mencakup iuran siswa, zakat, infaq, serta wakaf produktif, didukung partisipasi anggaran dan teknologi digital (Nurul Mawaddah Al-Mursal et al., 2025). Transparansi dana krusial agar mendukung tujuan pendidikan (Hamdana & Donna,

2024), sementara strategi efektif memastikan keamanan dan keberlanjutan, sejalan dengan standar akuntansi syariah serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Di Indonesia, dana utama seperti BOS dari pemerintah dilengkapi zakat, infaq, wakaf, dan sumbangan masyarakat. Pengembangan filantropi serta kemitraan swasta memperkuat keberlanjutan pendidikan Islam (Syaharani et al., 2024). Pengelolaan memerlukan mekanisme adaptif berbasis teknologi untuk transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan efisien, sehingga meminimalisir kesalahan (Samiyono, 2024). Perencanaan anggaran realistik berdasarkan analisis kebutuhan, lengkap dengan skenario alternatif, menjadi landasan utama (Syaharani et al., 2024).

Hasil wawancara mengungkap tantangan yang dihadai oleh SDS IT Al-Qalam seperti inkonsistensi iuran orang tua dan keterbatasan siswa yang berkontribusi, yang diatasi melalui kolaborasi pengelola, yayasan, dan wali murid. Partisipasi masyarakat via sumbangan dan penggalangan dana signifikan, selaras dengan filantropi Islam (Purnomo, 2017). Pengelolaan internal menekankan transparansi laporan dana yang aksesibel bagi semua pihak (Adzkia et al., 2024). Keberlanjutan bergantung pada efisiensi pengeluaran, diversifikasi, kolaborasi, monitoring teknologi, serta peran yayasan dalam perencanaan dan pendekatan donatur-pemerintah (Romdoniyah, Dedih, 2022).

Sejalan dengan hal ini, keberadaan yayasan pendidikan sebagai badan pengelola turut membantu dalam perencanaan, pengawasan, serta pengembangan sumber dana jangka panjang. Yayasan berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembiayaan, khususnya dalam melakukan pendekatan kepada donatur dan pemerintah untuk memperoleh dana bantuan (Sumarni, M.Si, 2018).

Studi ini berkontribusi pada literatur pengelolaan pendidikan Islam, menjadi rujukan strategis bagi SDS IT Al-Qalam dan lembaga serupa untuk pembiayaan berkelanjutan dan transparan. Pendekatan wawancara dokumentasi memberikan gambaran sistematis tentang identifikasi, pengumpulan, dan pengelolaan dana optimal, relevan dengan kondisi lapangan, modernisasi, serta nilai Islam di lembaga wakaf atau yayasan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SDS IT Al-Qalam yang beralamat di Kp. Karanganyar RT 003/001, Desa Cibuntu, Kec Wanayasa, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data dalam penelitian ini dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan analisis atau penggambaran data yang sesuai dengan realita yang terjadi. Creswell menyebutkan bahwa desain penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berkembang melalui pertanyaan terbuka, pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan data audio-visual, yang kemudian dianalisis secara tekstual melalui interpretasi tema dan pola-pola (John, 2015).

Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan secara sistematis untuk menggali secara mendalam berbagai sumber pembiayaan di SDS IT Al-Qalam melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini menekankan analisis induktif, dengan melibatkan kehadiran peneliti, subjek serta objek penelitian, cara penggalian data, lokasi, dan waktu penelitian, serta pengecekan keabsahan data. Jenis data yang digunakan mencakup data primer informasi langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder dari jurnal, buku, referensi internet, dan penelitian terkait.

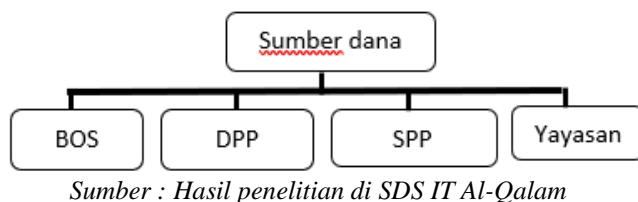
Metode analisis data melibatkan pengumpulan data (reduksi dan klasifikasi), review kategori, serta pelengkapan data untuk analisis lebih lanjut. Interpretasi dilakukan

secara logis dan empiris berdasarkan temuan lapangan, dengan validasi melalui triangulasi, pengamatan berkelanjutan, perluasan partisipasi, kecukupan referensi, dan metode pendukung lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Sumber pembiayaan utama terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sumber pokok dengan pelaporan triwulanan, Dana Pembangunan Pendidikan (DPP) dari pembayaran pangkal siswa sekali bayar untuk fasilitas, serta Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan untuk operasional harian meski ada keterlambatan akibat faktor ekonomi. Mekanisme manajemen menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan transparansi melalui komite sekolah. Kendala mencakup fluktuasi harga barang pada BOS dan tunggakan SPP.



**Gambar 1.**

Sumber pembiayaan di SDS IT Al-Qalam

### Pembahasan

#### A. Sumber pembiayaan di SDS IT Al-Qalam

Menurut Apriyani (2022), sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah pusat dan daerah, yayasan, masyarakat, orang tua/wali siswa, alumni, pengusaha, donatur, serta sumber lain yang bisa dimanfaatkan lembaga pendidikan. Pendekatan ini menciptakan sinergi antarpihak agar operasional dan pengembangan sekolah berjalan lancar serta berkelanjutan, sehingga lembaga mampu mandiri sekaligus didukung lingkungan luas (Apriyani, 2022).

Observasi di SDS IT Al-Qalam menunjukkan bahwa sumber dana dan dukungan lingkungan sangat memengaruhi kelancaran pengelolaan pendidikan. Sekolah pun sigap memperhatikan aspek krusial seperti sumber dana, metode pengumpulan, pihak bertanggung jawab, tujuan penggunaan, dan sistem pengelolaan.

*Pertama*, Di sekolah ini, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sumber utama, diatur oleh Juknis BOS tahunan. Laporan pertanggungjawaban diserahkan tiap triwulan atau saat pencairan dana ke rekening sekolah, baik secara daring maupun luring, sesuai pedoman Dinas Pendidikan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Nomor Urut	Kode Rekening	Keterangan	Maklumat Mengelolanya	Jumlah	Bentuk Pencairan dan Metode Anggaran					
					RISIP REGULER	RISIP KADARIS	APBAPRI / PENERJUA	RISPA	RISIP LAINNYA	Metode Pencairan
17	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	607. PENDIDAKAN AKADEMIK AM DAN BUDI PEKERTI	137.000	0	0	0	0	0	0
24	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	608. BANTUAN INDONESIA, Aman-aman yang Mengalih	175.000	0	0	0	0	0	0
19	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	609. Bantuan Kesehatan Masyarakat, My Novel Vision, Grade R	118.000	0	0	0	0	0	0
21	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	610. Bantuan Kesehatan Masyarakat, My Novel Vision, Grade R	118.000	0	0	0	0	0	0
41	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	611. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	111.000	0	0	0	0	0	0
42	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	612. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	111.000	0	0	0	0	0	0
43	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	613. PENDIDAKAN AKADEMIK YELAK DAN BUDI PEKERTI	104.000	0	0	0	0	0	0
44	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	614. LINDUNG BANJAR SGIN KLUK KLUK KLUK KLUK	103.000	0	0	0	0	0	0
45	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	615. LINDUNG BANJAR SGIN KLUK KLUK KLUK KLUK	188.400	0	0	0	0	0	0
47	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	617. Bantuan Indonesia, Mengalihnya Uts 1ta 2	117.000	0	0	0	0	0	0
48	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	618. Bantuan Indonesia, Mengalihnya Uts 1ta 2	117.000	0	0	0	0	0	0
49	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	619. Pendidikan Pendidikan Umum SGIN KLUK V	194.000	0	0	0	0	0	0
50	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	620. Pendidikan Pendidikan Umum SGIN KLUK V	194.000	0	0	0	0	0	0
51	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	621. Bantuan Kesehatan Masyarakat, My Novel Vision, Grade R	146.000	0	0	0	0	0	0
52	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	622. Bantuan Kesehatan Masyarakat, My Novel Vision, Grade R	146.000	0	0	0	0	0	0
53	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	623. JUMLAH BANJAR SGIN KLUK KLUK KLUK KLUK	109.000	0	0	0	0	0	0
54	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	624. JUMLAH BANJAR SGIN KLUK KLUK KLUK KLUK	109.000	0	0	0	0	0	0
55	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	625. JUMLAH BANJAR SGIN KLUK KLUK KLUK KLUK	258.000	0	0	0	0	0	0
56	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	626. JUMLAH BANJAR SGIN KLUK KLUK KLUK KLUK	258.000	0	0	0	0	0	0
57	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	627. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
58	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	628. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
59	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	629. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
60	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	630. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
61	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	631. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
62	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	632. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
63	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	633. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
64	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	634. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
65	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	635. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
66	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	636. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
67	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	637. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
68	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	638. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
69	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	639. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
70	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	640. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
71	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	641. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
72	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	642. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
73	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	643. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
74	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	644. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
75	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	645. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
76	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	646. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
77	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	647. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
78	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	648. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
79	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	649. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
80	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	650. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
81	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	651. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
82	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	652. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
83	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	653. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
84	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	654. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
85	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	655. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
86	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	656. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
87	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	657. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
88	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	658. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
89	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	659. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
90	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	660. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
91	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	661. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
92	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	662. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
93	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	663. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
94	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	664. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
95	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	665. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
96	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	666. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
97	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	667. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
98	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	668. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
99	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	669. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
100	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	670. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
101	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	671. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
102	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	672. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
103	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	673. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
104	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	674. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
105	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	675. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
106	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	676. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
107	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	677. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
108	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	678. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
109	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	679. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
110	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	680. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
111	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	681. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
112	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	682. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
113	51.2.09.01.01.0001	105.02.04.	683. BANTUAN PENGARAHAN KALAM DAN SOSIAL SGIN	210.000	0	0	0	0	0	0
114	51.2.09.01.01.0									

Anggaran pemerintah yang disalurkan melalui mekanisme anggaran pendidikan nasional dan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas di Indonesia. Mekanisme ini diatur secara ketat oleh pemerintah, di mana minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan, sebagaimana tertuang dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional (Suryani et al., 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pendanaan pemerintah yang menyalurkan anggaran khusus pendidikan benar-benar berdampak langsung pada keberlangsungan operasional sekolah. Dengan alokasi dana BOS yang cukup, sekolah dapat menjalankan berbagai kebutuhan pendidikan, seperti fasilitas belajar, pengembangan kualitas guru, dan kebutuhan operasional harian, yang kesemuanya sangat mendukung terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi, kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan tidak hanya menjadi angka formal, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama pendanaan yang menjadi penopang kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah secara efektif.

*Kedua*, Dana Pembangunan Pendidikan (DPP) yang berasal dari pembayaran pangkal peserta didik merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang bersifat satu kali dibayarkan pada awal masuk sekolah atau perguruan tinggi. Dalam konteks manajemen pembiayaan pendidikan, Rosidah menyebutkan bahwa Dana Pengembangan Pendidikan dibayarkan pada awal masuk sekolah dan hanya satu kali selama masa belajar yang biasanya tiga tahun, dengan jumlah bervariasi tergantung kebijakan sekolah atau institusi pendidikan. Dana ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan agar suasana belajar lebih nyaman dan memadai bagi peserta didik (Rosidah, 2022).

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SDS IT Al-Qalam, dana pembangunan pendidikan (DPP) yang berasal dari pembayaran pangkal peserta didik memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut. Dari wawancara dengan pihak administrasi sekolah, diperoleh informasi bahwa pembayaran DPP dilakukan satu kali pada saat siswa baru diterima. Dana ini kemudian dialokasikan secara khusus untuk pembangunan dan perbaikan sarana seperti ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lain yang menunjang proses pembelajaran.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan dana ini dikelola secara terbuka dan transparan dengan melibatkan komite sekolah sebagai bentuk akuntabilitas kepada orang tua peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori manajemen pembiayaan pendidikan yang menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pihak sekolah juga secara rutin mengadakan evaluasi penggunaan dana pembangunan agar semua pengeluaran jelas dan terukur secara administratif, sehingga dana pangkal peserta didik ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan kualitas lingkungan belajar.

Dana Pembangunan Pendidikan (DPP) yang berasal dari pembayaran pangkal peserta didik merupakan kontribusi awal yang sangat penting dalam membiayai pengembangan fasilitas pendidikan, baik fisik maupun non-fisik, yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih berkualitas. Secara keseluruhan, DPP bukan hanya soal uang yang dibayarkan di muka, tetapi juga cerminan partisipasi nyata masyarakat dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

*Ketiga*, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah iuran rutin yang wajib dibayarkan oleh peserta didik setiap bulan sebagai kontribusi dana untuk menunjang keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Menurut Nuri Piyanto dan Dewi Soyusiauwaty, SPP merupakan dana yang digunakan untuk pembinaan pendidikan,

yang meliputi dukungan terhadap proses belajar-mengajar, kesejahteraan guru dan staf, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Besaran SPP dapat berbeda antara satu jenjang kelas dengan jenjang lainnya, tergantung kebutuhan dan kebijakan sekolah (Saputra, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola keuangan SDS IT Al-Qalam, SPP menjadi salah satu sumber pendanaan utama yang menopang berbagai aktivitas pendidikan di sekolah ini. Pembayaran SPP di SDS IT Al-Qalam dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang disesuaikan antar jenjang kelas, dan dana yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan fasilitas, pengadaan buku, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Namun, dalam pengamatan dan wawancara, ditemukan bahwa ada beberapa siswa yang mengalami kendala dalam pembayaran SPP karena faktor ekonomi keluarga. Sekolah memberikan kebijakan fleksibel dengan menyediakan opsi cicilan atau penundaan pembayaran bagi siswa tersebut, supaya tidak mengganggu proses pendidikan mereka.

Sumbangan Pembinaan Pendidikan melalui pembayaran SPP memang merupakan komponen vital dalam keberlangsungan operasional sekolah, terutama sekolah swasta seperti SDS IT Al-Qalam. Kajian teori dari para ahli menggarisbawahi peranan SPP sebagai sumber pendanaan utama yang harus dikelola dengan baik, transparan, dan efisien agar dapat mendukung kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Dari hasil observasi di SDS IT Al-Qalam, penerapan kebijakan keringanan bagi siswa kurang mampu adalah langkah tepat yang menunjukkan perhatian sekolah pada aspek keadilan dan keberlanjutan pendidikan.

Integrasi teknologi dalam pengelolaan SPP juga merupakan inovasi penting yang dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan mempercepat proses pencatatan pembayaran. Namun, perlu terus dievaluasi agar sistem ini benar-benar dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak, termasuk wali siswa yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan SPP di SDS IT Al-Qalam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang ada, namun tetap dibutuhkan penguatan dalam aspek kebijakan fleksibilitas dan peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

Manajemen pembayaran SPP menjadi aspek penting karena keteraturan pembayaran sangat berpengaruh pada kelancaran operasional sekolah. Dalam praktiknya, manajemen ini mencakup pencatatan yang teliti, pelaporan secara rutin, dan penanganan tunggakan dengan bijaksana untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa (Siagian, 2020). Dampak langsung dari pembayaran SPP yang terkelola dengan baik adalah peningkatan kualitas pendidikan yang nyata, seperti fasilitas belajar yang memadai, guru yang terus mendapat pelatihan profesional, serta tersedianya sumber belajar yang lengkap. Namun, jika terjadi hambatan seperti tunggakan SPP yang tinggi, hal ini dapat menimbulkan masalah serius bagi keberlanjutan sekolah, termasuk keterbatasan dalam pengembangan program unggulan dan turunnya motivasi tenaga pengajar (Kharida Shaleha & Sartika Panggabean, 2022).

Manajemen pembayaran SPP memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran operasional sekolah karena keteraturan pembayaran berdampak langsung pada keberlangsungan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pembayaran yang baik meliputi pencatatan yang rapi, pelaporan rutin, serta penanganan tunggakan dengan cara yang bijak agar hubungan dengan orang tua tetap harmonis. Dengan manajemen SPP yang efektif, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui fasilitas yang memadai, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan ketersediaan sumber belajar lengkap. Sebaliknya, tunggakan pembayaran yang tinggi dapat menimbulkan masalah serius seperti keterbatasan pengembangan program sekolah dan menurunnya motivasi tenaga pengajar, yang akhirnya mengganggu mutu pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu,

pengelolaan pembayaran SPP harus dilakukan secara teliti dan transparan untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan sekolah secara menyeluruh.

### B. Mekanisme manajemen pembiayaan di SDS IT Al-Qalam

Manajemen pembiayaan pendidikan menurut Anis Zohriah et al, yakni meliputi pengelolaan dana mulai dari pengumpulan, pengalokasian, hingga pelaporan, untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan agar kualitas serta pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan baik (Zohriah et al., 2023). Jadi, manajemen pembiayaan pendidikan meliputi pengelolaan dana dari pengumpulan hingga pelaporan untuk mendukung operasional dan pengembangan pendidikan. Tujuannya memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Pendapat Anis Zohriah dan rekan-rekannya mengenai manajemen pembiayaan pendidikan sangat relevan dengan praktik yang ditemukan di SDS IT Al-Qalam. Mereka menekankan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan, pengalokasian, hingga pelaporan yang dilakukan secara transparan. Tujuan utama dari proses ini adalah agar penggunaan dana bisa berjalan dengan efisien, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan pemerataan akses bagi semua siswa.

B. PENGELOLAAN									
NO	PROGRAM SEKOLAH	URAIAN	DURASI	PIC	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH	JUMLAH
1	PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)							4.700.000	-
	1.1 Pencapaian Standar Kelulusan (SKL)							-	-
	1.1.1 Pemberian tugas terstruktur	tugas harian atau pr						-	-
	1.1.2 Pemberian tugas mutabahah Yaumiyah	Membuat tagihan berupa format	Setiap hari efektif	Guru Diniyah				-	-
	1.1.3 Pelaksanaan Perbaikan Pengayaan	Dilaksanakan setelah selesai Ulangan atau PTS dan PAT	1 bulan sekali untuk Ulangan harian, tiga bulan sekali untuk PTS dan 6 Bulan sehabis PAS/PAT	Guru yang bersangkutan				-	-
	1.1.4 Penyelenggaraan Program Les							-	-
	1.1.5 Penyetaoran Tagihan Pembelajaran	Tiap hari Jumat siswa menyertorkan Buku Tagihan	1 Minggu sekali	Guru Diniyah				-	-
	1.1.6 Pengadaan Studi tour	bisa outbound atau tour	per satu tahun ajaran	Guru	1 acara	3.000.000	3.000.000		
	1.1.7 Perlombaan/pengetesan Akademik	bisa kemampuan dasar atau diniyah	per satu tahun ajaran	Guru	2 acara	200.000	400.000		
	1.1.8 Tes Kemampuan Dasar Kis 3 (Evaluasi)		per satu tahun ajaran	Guru	1 acara	300.000	300.000		
	1.1.9 Outing Class		per satu tahun ajaran	Guru	1 acara	1.000.000	1.000.000		

*Sumber : Hasil penelitian di SDS IT Al-Qalam*

**Gambar 2.**

**Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SDS IT Al-Qalam**

Dari hasil wawancara dan observasi di SDS IT Al-Qalam, terlihat bahwa sekolah ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan serius. Lembaga tersebut mengelola keuangan menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dijalankan secara terbuka. Transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi bagian penting agar semua pihak, terutama orang tua dan pengawas sekolah, dapat memantau penggunaan dana secara jelas.

Dengan sistem pengelolaan yang rapi dan transparan ini, SDS IT Al-Qalam mampu menjaga kepercayaan semua stakeholder sekaligus memastikan bahwa dana yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk operasional sekolah dan pengembangan pendidikan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Anis Zohriah dkk, bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci agar kualitas dan pemerataan pendidikan bisa terwujud secara maksimal.

Selain transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan, ada juga poin penting yang harus diterapkan dalam mengelola keuangan pendidikan yakni jujur. Menurut

Nur Afifah dalam jurnalnya yang berjudul “implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sebagai peningkatan mutu di tk islam bina amanah Surabaya”, menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan secara amanah akan meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Implementasi amanah ini sangat penting agar dana pendidikan dikelola dengan tanggung jawab dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga mendukung kualitas pendidikan secara optimal (Afifah & Munastiwi, 2022).

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di SDS IT Al-Qalam, manajemen pembiayaan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip amanah yang sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga dana digunakan secara optimal untuk kebutuhan pendidikan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana, dan seluruh proses didokumentasikan dengan baik, ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menjalankan amanah sesuai nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pengelolaan keuangan.

Jadi dapat di Tarik kesimpulan, bahwa nilai amanah memainkan peran krusial dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang kuat, pengelolaan dana pendidikan tidak hanya menjadi lebih terpercaya tetapi juga berdampak positif pada kualitas pendidikan itu sendiri. Saya percaya bahwa ketika dana dikelola dengan penuh amanah, maka seluruh proses pembelajaran akan lebih terjamin, dan visi pendidikan yang berkualitas dapat tercapai dengan baik. Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi juga soal menjaga kepercayaan dan integritas dalam menjalankan tugas mulia di dunia pendidikan.

### **C. Kendala dan tantangan dalam pengelolaan sumber pembiayaan di SDS IT Al-Qalam**

Pembahasan mengenai kendala dan tantangan dalam pengelolaan sumber pembiayaan pendidikan sangat penting untuk memahami bagaimana dana pendidikan bisa dikelola secara efektif demi peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan beberapa jurnal ilmiah yang relevan, terdapat beberapa kendala utama yang sering muncul dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

*Pertama*, Turambi (2024) dalam studi evaluasi pengelolaan dana BOS di SD Negeri 76 Manado menyatakan bahwa perubahan harga barang menjadi salah satu hambatan dalam perencanaan anggaran penggunaan dana BOS sehingga alokasi dana menjadi kurang efektif. Turambi juga menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan agar dana yang terbatas betul-betul dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil sekolah sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan (Turambi et al., 2024). Jadi, fluktuasi atau perubahan harga barang dipasaran dapat menghambat perencanaan anggaran BOS, sehingga evaluasi terus-menerus sangat penting agar dana dapat dialokasikan dengan tepat untuk kenyataan kebutuhan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan temuan di lapangan di SDS IT Al-Qalam, hasil observasi dan wawancara menunjukkan kesamaan dengan temuan Turambi (2024) terkait kendala perubahan harga barang yang memengaruhi perencanaan anggaran penggunaan dana BOS. Di SDS IT Al-Qalam, perubahan harga bahan kebutuhan operasional yang fluktuatif menyebabkan alokasi dana BOS terkadang harus disesuaikan mendadak, sehingga alokasi dana untuk pengembangan pembelajaran dan inovasi menjadi kurang optimal. Jadi, perubahan harga pasar menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Selain itu, observasi menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di SDS IT Al-Qalam sudah dilakukan oleh tim pengelola dana dan melibatkan berbagai pihak, namun tantangan utama adalah pengawasan dan ketepatan pelaporan yang belum sepenuhnya

optimal. Ini sejalan dengan poin bahwa evaluasi berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan dana yang terbatas dapat dialokasikan sesuai kebutuhan nyata sekolah.

Wawancara dengan kepala sekolah SDS IT Al-Qalam mengungkapkan bahwa meskipun kepala sekolah dan tim berupaya menjalankan manajemen pembiayaan secara transparan dan sesuai juknis, dinamika harga barang menjadi kendala yang cukup menghambat efektivitas penggunaan dana BOS. Dengan demikian, temuan di SDS IT Al-Qalam mendukung pernyataan Turambi (2024) bahwa untuk mencapai pengelolaan dana BOS yang efektif, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih intensif serta perencanaan anggaran yang adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

*Kedua*, keterlambatan pembayaran SPP oleh wali siswa kerap terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan lingkungan sekitar yang kurang mendukung secara finansial. Wali siswa seringkali harus mengutamakan kebutuhan pokok sehingga pembayaran SPP menjadi terbengkalai. Menurut Mursalim (2024) dalam penelitian di MDTA Nurul Hikmah I menunjukkan ekonomi menjadi faktor utama dan perlu pendekatan yang bijak agar wali siswa terbantu tanpa menambah beban mereka (Untuk et al., 2024). Dengan demikian komunikasi antara wali siswa dengan pihak lembaga pendidikan tetap terjaga dengan baik, tanpa menimbulkan masalah yang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil observasi dan wawancara kepala sekolah SDS IT Al-Qalam, ditemukan juga masalah keterlambatan pembayaran SPP oleh wali siswa. Kendala tersebut memang sering dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar yang kurang stabil. Banyak wali siswa yang harus memprioritaskan kebutuhan pokok rumah tangga sehingga kewajiban membayar SPP sering tertunda. Untuk mengatasi hal ini, SDS IT AL-Qalam rutin mengadakan rapat komite sekolah sebagai forum untuk mendiskusikan dan mencari solusi terbaik, sehingga masalah keterlambatan pembayaran dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan komunikasi yang harmonis antara wali siswa dan lembaga pendidikan. Pendekatan seperti ini memungkinkan adanya kebijakan yang fleksibel dan saling pengertian agar wali siswa tidak merasa terbebani dan pihak sekolah tetap berjalan dengan lancar.

Dari dua permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh sekolah, baik terkait fluktuasi harga barang dalam pengelolaan dana BOS maupun keterlambatan pembayaran SPP oleh wali siswa akibat kondisi ekonomi, memerlukan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan. Evaluasi dan pengawasan yang intensif sangat penting agar dana yang terbatas dapat dialokasikan secara efektif sesuai kebutuhan nyata sekolah sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, komunikasi yang baik dan kebijakan fleksibel dalam menangani keterlambatan pembayaran SPP dapat menjaga harmonisasi hubungan antara wali siswa dan lembaga pendidikan, sehingga solusi yang ditemukan dapat memberikan manfaat bersama tanpa menambah beban pihak wali siswa maupun sekolah. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu dirancang secara strategis dengan mempertimbangkan dinamika riil di lapangan.

## **KESIMPULAN**

Sumber pembiayaan di SDS IT Al-Qalam berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai sumber utama, Dana Pembangunan Pendidikan (DPP) yang dibayarkan sekali pada awal masuk, serta Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang merupakan iuran rutin bulanan. Pengelolaannya dilakukan secara transparan dengan kebijakan fleksibilitas bagi siswa kurang mampu dan integrasi teknologi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan kualitas layanan sekolah secara efektif.

Manajemen pembiayaan di SDS IT Al-Qalam berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan amanah yang kuat, menggunakan RKAS secara terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini menjaga kepercayaan serta memastikan dana digunakan optimal untuk operasional dan pengembangan pendidikan,

sesuai prinsip pengelolaan dana yang efisien dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa SDS IT Al-Qalam menghadapi dua kendala utama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan: fluktuasi harga barang yang mengganggu perencanaan dana BOS dan keterlambatan pembayaran SPP akibat kondisi ekonomi wali siswa. Penyesuaian anggaran yang sering mendadak mengurangi optimalisasi pengembangan pembelajaran, sementara keterlambatan SPP diatasi lewat komunikasi intensif dan kebijakan yang fleksibel. Pendekatan adaptif, evaluasi berkelanjutan, dan pengawasan ketat diperlukan agar dana terbatas dapat dialokasikan tepat guna dan menjaga hubungan harmonis antara sekolah dan wali siswa demi mutu pendidikan yang berkelanjutan.

## **SARAN/REKOMENDASI**

Lembaga pendidikan disarankan untuk terus mendiversifikasi dana melalui penguatan kemitraan dengan yayasan, pemerintah, dan masyarakat sekitar, sambil menerapkan pengelolaan transparan berbasis Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan partisipasi aktif komite sekolah serta orang tua siswa. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perlu dioptimalkan guna mengatasi kendala seperti fluktuasi harga barang serta keterlambatan pembayaran SPP akibat kondisi ekonomi wali murid, sehingga efisiensi dana BOS, DPP, dan SPP dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin akuntabilitas sesuai nilai-nilai syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder demi kualitas pendidikan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adzkia, R., Anastasya, F., Awallyah, N. S., & Kusumaningrum, H. (2024). Manajemen Keuangan Sekolah: Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana. *Al-Garafi : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 2(3), 278–289. <https://www.jurnal.zarilgapari.org/index.php/gafari>
- Afifah, N., & Munastiwi, E. (2022). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan sebagai Peningkatan Mutu di TK Islam Bina Amanah Surabaya. *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 162–173. <https://doi.org/10.59355/risda.v6i2.70>
- Apriyani, A. (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 1(03), 1–11. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
- Aris Sutikno, Mahmudah, M., Riya Septi Ayana, Siminto, S., & Triwid Syafarotun Najah. (2024). Strategi Manajemen Pembiayaan dalam Menjamin Keberlanjutan Lembaga Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2120–2130. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.776>
- Dan, P., Di, P., & Negeri, S. M. A. (2024). Analisis Sumber Pendanaan Pendidikan Dalam. *Al-Marsus*, 2.
- Fikri Rijal. (2024). 918-Article Text-3793-1-10-20241219. 6468, 155–166.
- Hamdana, A. P., & Donna, S. R. (2024). Financial Management in Islamic Boarding Schools (Pesantren). *Indonesian Journal of Research in Islamic Studies*, 1(2), 58–64. <https://doi.org/10.64420/ijris.v1i2.215>
- John, W. C. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(3), 522.
- Kharida Shaleha, & Sartika Panggabean, D. (2022). *Edumaniora : Journal of Education and Humanities*. 40.

- Nurul Mawaddah Al-Mursal, Hamdi Abdul Karim, & Hafiz Azhari. (2025). Effective Strategies in the Financial Management of Islamic Educational Institutions: Identifying Sources and Optimizing Management. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.46838/jbic.v6i1.740>
- Purnomo, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)*. 26–54. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3367/>
- Rahma, A. A., & Al Munir, S. T. F. (2025). Analisis Sumber dan Strategi Pembiayaan Pendidikan di SMP Swasta. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(4), 10. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i4.738>
- Romdoniyah, Dedih, & A. (2022). *Epistemic : Jurnal Ilmiah Pendidikan Epistemic : Jurnal Ilmiah Pendidikan*. 01(02), 131–152.
- Rosidah, S. (2022). *Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Peran Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Anggaran di KKMts 1 Karawang*. 47–98. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59123>
- Samiyono. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. *Edukasiana: Journal of Islamic Education*, 3(1), 233–245. <https://doi.org/10.61159/edukasiana.v3i1.189>
- Saputra, M. B. (2021). Aplikasi Pembayaran Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) Pada SMP Frater Makassar. *Prosidingseminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, X(1), 30–39.
- Siagian, E. (2020). Pelatihan Pembayaran Spp Berbasis Web Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Swasta Nurani Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(2), 480–486. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=uml9xswAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=uml9xswAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=uml9xswAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sumarni, M.Si, S. (2018). Peran Dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16(2), 218–231. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.490>
- Suryani, Y., Pertiwi, I. I., Mustafa, I. A., Mulawarman, W. G., & Haryaka, U. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan. *Alsys*, 5(3), 376–391. <https://doi.org/10.58578/alsys.v5i3.5461>
- Syaharani, D. F., Intan, N., Oktavia, V., & Maryati, S. (2024). Strategi Efektif Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam. *Cendekia Pendidikan*, 4(3), 21–32.
- Turambi, K., Budiarso, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 180–197. <https://doi.org/10.58784/rapi.150>
- Untuk, D., Tugas, M., & Memenuhi, D. (2024). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum*. 6110, 2016.
- Zohriah, A., Bachtiar, M., Fatmariyanti, Y., Sultan, U., Banten, M. H., & Serang, K. (2023). a Management of Educational Financing At the Education Institution; a Concept, Law and Models. *JURNAL INDOPEDIA (Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan)*, 1(2), 443–451.